

Upaya Brazil Dalam Mengatasi Persoalan Pengungsi Dari Venezuela Tahun 2017-2020

Betrix Firginia¹

***Abstract :** Venezuela suffered a economic and political crisis since 2014 which was the result of Venezuela facing multidimensional crisis. This has caused many people to flee to other countries for help and security. High of number Refugee and asylum seeker from Venezuela became issues and facing new obstacles in Brazil. The issue of Venezuelan refugees in Brazil has prompted the Brazilian government to make significant efforts that are more relevant and responsive to the issue of refugees by applying the political systems theory by David Easton to explain these efforts.. In this research, descriptive research is used and the type of data used is secondary data. The results of this study indicate that the Brazilian government's efforts in dealing with Venezuelan refugees are able to overcome the impact of the existence of refugees in Brazil due to the economic crisis experienced by Venezuela*

***Keywords:** Brazil Efforts, Venezuelan Refugees, CONARE, System Politic, Policy*

Pendahuluan

Venezuela sebagai negara yang memiliki perekonomian relatif stabil dikawasan amerika latin, menjadi salah satu negara yang memilik sumber cadangan minyak terbesar di dunia hingga menjadikan hasil minyak sebagai aspek penting dalam perkembangan ekonomi di negara tersebut. Namun pada saat harga minyak dunia di tahun 2014 merosot turun kondisi ekonomi negara tersebut runtuh setelah sebelumnya di tahun 2013 Venezuela mengalami inflasi yang mencapai 50% serta adanya tunggakan utang luar negeri yang meningkat di era Chavez. (Meghan O'Sullivan, 2017).

Krisis ekonomi semakin meluas dengan situasi politik yang tidak harmonis antara pemerintah dan oposisi dalam perebutan kekuasaan, sehingga memicu krisis multidimensional dinegara tersebut, seperti inflasi, krisis kesehatan, pengangguran yang meningkat, kelangkaan bahan pangan, kelangkaan kebutuhan dasar dan obatan-obatan, layanan-layanan publik tidak dapat diakses, serta masalah keamanan dan kriminalitas yang meningkat (Juan Blyde, Camila Cortes, 2020).

Akibat kondisi yang terjadi di Venezuela, jutaan orang meninggalkan negara tersebut ke berbagai negara dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Secara keseluruhan pengungsi Venezuela tersebar di Amerika Latin yang merupakan negara tujuan paling dekat dengan Venezuela. Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Venezuela serta penerimaan terhadap pengungsi dengan kebijakan *Open Door Policy* menjadikan Brazil sebagai salah satu negara tujuan bagi pengungsi Venezuela.

Komitmen Brazil dalam untuk melindungi pengungsi ditunjukkan dengan meratifikasi Konvensi 1951, Protokol 1967 dan tahun 1997 Undang-Undang No

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : saya.betrixfirginia@gmail.com

9.474/97 (*The 1997 Brazilian Refugee Act*) disahkan yang menandai pencapaian Brazil menjadi bagian dalam upaya perlindungan terhadap pengungsi dengan mendirikan badan khusus yaitu *Comite Nacional para os Refugiado* (CONARE) menjadi lembaga yang dibawah oleh kementerian hukum yang berperan menerima serta memberikan status bagi para pencari suaka yang ingin mengungsi atau tinggal di negara tersebut sesuai dengan undang-undang Pengungsi yang berisi mekanisme perlindungan pengungsi (www.loc.gov).

Undang-undang ini secara eksklusif dan spesifik berfokus pada penanggulangan pengungsi. Secara inovatif undang-undang ini memudahkan pengungsi mendapatkan status bagi keluarganya dan melebarkan definisi klasik pengungsi dengan mengadopsi 'semangat Deklarasi Cartagena' yang mengikutkan pelanggaran berat terhadap HAM sebagai alasan sah mendapatkan status pengungsi. Selain itu penanggulangan permasalahan pengungsi dan migran juga menjadi isu yang dimasukkan dalam perluasan kerangka kerjasama yang dilakukan dalam *Mercado Comun del Sur* (MERCOSUR) yang merupakan kesepakatan antar-negara kawasan Amerika Latin dalam bidang ekonomi dimana Brazil ikut terlibat didalamnya (acnur.org, 2012).

Akibat krisis yang berkepanjangan arus pengungsi yang besar masuk ke Brazil datang melalui jalur darat di perbatasan utara Brazil yang merupakan pintu utama bagi pengungsi. Perjalanan menuju Brazil dapat ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga menjadikan negara bagian tersebut sebagai tujuan utama bagi pengungsi yang perekonomiannya dibawah garis kemiskinan yang sekedar datang untuk mendapatkan layanan kesehatan maupun yang datang dengan tujuan ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Persebaran pengungsi Venezuela yang masuk ke Brazil terkonsentrasi di dua kota negara bagian Roraima yaitu di kota Pacairama dan Boa Vista. Pacairama sendiri secara historis merupakan kota kecil di negara bagian Roraima dan berfungsi sebagai pintu utama yang menghubungkan kegiatan ekonomi masyarakat Venezuela serta perawatan medis ke Brazil, selain masyarakat Brazil sering berwisata di pantai-pantai Karibia Venezuela, terutama selama bulan Januari, Desember, dan Juli ([Dr.Tassio Franchi, 2019](#)). Ditahun 2015-2018 sekitar 500.000 jiwa ikut mencatatkan diri sebagai negara bagian dengan permintaan permohonan pengungsi tertinggi akibat (unhcr.org, 2018).

Kedatangan pengungsi dengan jumlah yang besar membuat pemerintah lokal kewalahan dalam memberikan penanganan bagi pengungsi, selain itu permohonan suaka yang diajukan ditetapkan oleh CONARE mengingat pengungsi Venezuela secara umum tidak teridentifikasi sebagai pengungsi menurut definisi pengungsi undang-undang di Brazil sehingga harus diidentifikasi secara individu. Pemerintah Roraima kesulitan dalam mengucurkan dana bantuan karena kondisi ekonomi negara tersebut perekonomiannya paling rendah dari seluruh negara bagian di Brazil. Daerah Roraima juga terisolasi dari pusat pemerintah federal, serta terbatasnya penanganan gelombang pengungsi memberikan dampak langsung pada kemampuan layanan publik dan mempengaruhi dinamika sosial antara pengungsi dan penduduk lokal sehingga hal tersebut dengan cepat menjadi tantangan ekonomi dan sosial bagi Roraima.

Upaya pemerintah Roraima dan lembaga masyarakat tidak cukup untuk mengatasi persoalan pengungsi Venezuela sehingga memerlukan respon dari pemerintah federal dalam mengambil keputusan terkait situasi tersebut serta meningkatnya jumlah permohonan pengungsi menjadi kelemahan bagi pemerintah lokal Brazil utara dalam memberikan pelayanan maksimal, akibat fenomena dari meningkatnya jumlah populasi situasi di Boa Vista dan Pacairama menjadi tidak terkontrol dimana kasus xenophobia,

diskriminasi, kekerasan terjadi sehingga persoalan keamanan, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, makanan, sanitasi, pengangguran serta akses pelayanan publik menjadi isu utama yang di hadapi oleh pengungsi Venezuela ([Prof. Natália Medina Araújo, 2018](#)). Berdasarkan kondisi ini, penulis tertarik untuk mengetahui upaya Pemerintah Brazil dalam mengatasi persoalan pengungsi dari Venezuela.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep Teori Sistem Politik

Secara umum sistem politik merupakan istilah yang menerangkan suatu kerangka besar tentang hakikat dan proses politik dalam pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Secara parsial menurut teori klasik Aristoteles sistem politik dipahami sebagai usaha dalam mewujudkan kepentingan bersama dalam bentuk proses pembuatan kebijakan.

Dalam teori sistem politik menurut David Easton terdapat unsur-unsur dalam sistem politik yaitu *input*, konversi (proses), *output* dan lingkungan, yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan merupakan hasil konversi dari input yang berupa tuntutan maupun dukungan yang diolah secara sistematis oleh sistem politik sehingga menghasilkan keputusan atau tindakan yang disebut *output*. Untuk memahami sistem politik, menurut Easton ada empat ciri atau atribut yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu ([David Easton, 1957](#)) :

1. Unit-unit dan Batasan-batasan Suatu Sistem Politik, di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda sistem politik.
2. Input dan output adalah pertama, Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sebuah sistem politik yang berupa tekanan atau tuntutan maupun dukungan. Kedua, Output dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan dan dukungan yang masuk. Kedua adalah tindakan adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat, kedua hal ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah. Keputusan
3. Diferensiasi dalam sebuah sistem adalah harus memiliki pembedaan atau pemisahan kerja di dalam dan fungsi pekerjaannya.
4. Integrasi dalam suatu sistem tetap harus memperhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antarunit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep Pengungsi

Pengungsi atau istilah “pengungsi” secara umum adalah orang yang mencari perlindungan yang mana terdapat dua jenis pengungsi yaitu pengungsi internal dan pengungsi lintas batas. Menurut Pietro Verri definisi Pengungsi merujuk pada Konvensi tahun 1951 pasal 1A ayat 2 yang isinya Pengungsi didefinisikan sebagai orang-orang yang berada diluar dari negara / tempat tinggal aslinya, berdasarkan terjadinya ketakutan yang nyata akan keselamatannya atas dasar alasan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan kelompok tertentu atau pendapat politik yang dianutnya tidak ingin mendapatkan pertolongan dari negara asal atau kembali kesana akibat adanya kekhawatiran akan keselamatan (.).

Latar belakang yang memicu arus gelombang pengungsi pengungsi dapat dikelompokkan menjadi dua variabel yang pertama, *Natural disaster* dimana adanya pengungsi yang datang disebabkan oleh bencana alam. Kedua, *Man-made disaster*, adanya pengungsi yang disebabkan oleh bencana yang disebabkan oleh ulah manusia.

Definisi pengungsi ini bertujuan untuk mengetahui status pengungsi serta membedakannya dengan pencari suaka (*Asylum Seeker*) dimana status sebagai pengungsi adalah tahapan dari proses pencarian suaka diluar negara asalnya sedangkan seorang pengungsi adalah sekaligus pencari suaka, seorang pengungsi dapat dikategorikan sebagai pengungsi ketika statusnya diakui oleh instrumen hukum internasional dimana hak-hak dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut serta kewajiban diberikan. Adapun Istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pengungsi internasional yang dimaksud sebagai berikut ([Achmad Romsan,dkk, 2003](#)) :

1. *Economic Migrant* (Migran Ekonomi) adalah orang-orang yang keluar meninggalkan negaranya karena alasan pertimbangan ekonomi.
2. *Refugees Sur Place* adalah seseorang atau kelompok yang bukan pengungsi namun berada di negaranya namun menjadi pengungsi, tetapi kemudian menjadi pengungsi dikarenakan keadaan yang terjadi di negara asalnya selama ia tidak ada.
3. *Statutory Refugees* (Pengungsi Statuta) Adalah Status pengungsi diberikan sesuai dengan perjanjian internasional sebelum Convensi 1951.
4. *War Refugees* (Pengungsi Perang) Adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional atau nasional yang tidak dianggap pengungsi biasa menurut Konvensi 1951 atau Protokol 1967.
5. *Mandate Refugee* Adalah penentuan status refugee bukan dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tetapi berdasarkan mandat dari UNHCR.
6. *Convention Refugee* Adalah pemberian status pengungsi diberikan berdasarkan Convensi 1951 dan Protokol 1967, dimana keberadaan pengungsi berada di negara peserta konvensi atau host country dan status mereka ditetapkan adalah negara adalah "orang atau kelompok orang yang terpaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka, khususnya sebagai akibat dari atau untuk menghindari dampak konflik bersenjata, situasi kekerasan umum, pelanggaran hak asasi manusia atau bencana alam atau buatan manusia, dan yang belum melintasi perbatasan yang diakui secara internasional
7. *Internally Displaced Persons / IDPs* Adalah orang atau kelompok orang yang dipaksa atau terpaksa pergi meninggalkan rumah tempat mereka dahulu biasa tinggal akibat dari menghindar dari dampak konflik bersenjata atau situasi rawan yang ditandai maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran HAM, bencana alam, atau bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.
8. *Stateless Persons* (Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan) Adalah etiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan didalam negara asalnya menjadikannya tidak memiliki kewarganegaraan penyebabnya adalah seseorang dapat menjadi tidak memiliki kewarganegaraan, yaitu sejak lahir atau akibat perubahan dalam negara asalnya

Metode Penelitian

Penelitian *deskriptif* adalah metode penelitan yang digunakan. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder dan teknik penelitian *Library research* digunakan dalam pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi

tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, sehingga didapat analisa dengan relevan atas permasalahan yang ada..

Hasil dan Pembahasan

Krisis ekonomi dan politik menjadi penyebab gelombang pengungsi meninggalkan Venezuela, Venezuela di kenal sebagai negara yang cadangan minyak bumi dan juga memiliki cadangan gas alam yang cukup besar, meskipun perkembangan gas alam tertinggal jauh di belakang perkembangan eksplorasi minyak. Bersama Iran, Iraq, Kuwait, and Saudi Arabia, Venezuela menjadi salah satu anggota pendiri *Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)*. Sebagai negara penghasil minyak terbesar didunia, dengan mengandalkan hasil bumi yaitu minyak sebagai penopang perekonomian eksplorasi minyak bagi Venezuela menyumbang sebesar 30% dari GDP Venezuela ([Antoine Halff,dkk 2015](#)).

Setelah Perang Arab-Israel atau *the Yom Kippur War* pada tahun 1973, Venezuela mendapatkan kesempatan mengekpor minyak dengan harga yang tinggi akibat embargo yang dilakukan Arab Saudi terhadap US dan Israel, kegiatan ekspor tersebut menjadikan ledakan ekonomi dan memicu besarnya pengeluaran Venezuela terhadap impor makanan dan barang-barang mewah serta meningkatkan tindak korupsi dan menciptakan elit ekonomi. Nasionalisasi industri minyak pada tahun 1976 dibawah pemerintahan Carloz Andrez Perez bersamaan dengan dibentuknya *Petroleos de Venezuela (PDVSA)* sebagai perusahaan minyak milik negara yang menjadi pusat industri minyak memberikan dukungan bagi pengeluaran publik yang besar untuk membiayai program pembangunan publik dan pengeluaran yang besar layanan sosial.

Ledakan ekonomi ini tidak berlangsung lama setelah pada akhir periode tahun 1970-an resesi internasional dan surplus minyak dunia memangkas harga minyak dunia dan menjerumuskan negara ke dalam stagnasi ekonomi, kondisi ini berlanjut hingga akhir 1980-an pada tahun 1980 harga minyak dunia berada pada 35 US\$ dollar per barrel, kemudian ditahun 1986 berada 27 US\$ per barrel menjadi 10 US\$ dollar per barrel.[\(britannica.com\)](#). Warisan kondisi ekonomi dan ketidakmampuan pemerintah untuk membayar hutang luar negeri mencapai puncak krisis setelah devaluasi mata uang untuk pertama kalinya dalam dua dekade dan langkah-langkah penghematan terhadap pengeluaran negara dan menunda pembayaran pinjaman luar negeri di tahun 1983, penurunan drastis harga minyak dunia di tahun 1988 telah memangkas setengah pendapatan pemerintah dan pembayaran utang luar negeri yang dijadwalkan menciptakan kondisi yang sulit bagi Venezuela. Upaya yang dilakukan pemerintah Venezuela tidak berhasil menyelamatkan perekonomian negara tersebut berujung pada meningkatnya utang luar negeri pada IMF dan masalah sosio-ekonomi serta politik di negara tersebut.

Pada tahun 1998 Venezuela dengan “Revolusi Bolivarian” dibawah pemerintahan Hugo Chavez perubahan nama Venezuela menjadi *República Bolivariana de Venezuela* di ikuti dengan perubahan arah politik, sosial dan ekonomi, yang mendukung hak-hak kaum terpinggir dan hal ini menandai awal dilakukannya perubahan untuk memulihkan krisis ekonomi di Venezuela. Chavez kembali menasionalisasikan aset swasta disektor-sektor strategis yang diprivatisasi oleh pemerintah sebelumnya termasuk perusahaan minyak PDVSA, kebijakan nasionalisasi ini memberikan dampak yang besar pada perekonomian Venezuela dimana selama ledakan harga minyak meningkat pada periode pemerintahannya yang pertama, harga minyak yang berkisar dari 10 US\$ per barel

meningkat hingga menyentuh harga 133 US\$ per barel di tahun 2008 (Mark Weisbrot and Rebecca Ray, 2008).

Hugo Chavez kemudian memanfaatkan kesempatan ini pemerintah Venezuela untuk mengalokasikan hasil minyak pada program sosial dan subsidi pangan dan energi dan hal tersebut di implementasikan dalam kebijakan yang di kenal “*The Misiones*” tujuan kebijakan ini adalah negara memfasilitasi masyarakat miskin dan mengurangi masalah sosial ekonomi yang ada dalam negara tersebut dengan memberikan subsidi pada sektor pendidikan, harga pangan, hunian, dan juga kesehatan ([Penfold-Becerra, M, 2007](#)).

Dilihat dari kebijakan dan pemanfaatan minyak yang digunakan selama Regim Hugo Chavez membuat ketergantungan negara tersebut terhadap sumber daya minyak, yang mana subsidi, kontrol harga, impor bahan pangan, dan *agro-food policy* sebagai upaya untuk mempertahankan harga pangan yang murah dan terjangkau. Namun akibat campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi tersebut serta praktek korupsi membawa Venezuela pada inflasi dan munculnya pasar gelap, program-program pemerintah yang mengandalkan dana dari pendapatan minyak akhirnya tidak dapat berjalan normal ketika harga minyak dunia turun pada tahun 2014 sehingga aktivitas ekonomi lesu dan menyebabkan guncangan harga komoditas, devaluasi mata uang lokal, meningkatnya inflasi dan kelangkaan bahan pangan menciptakan situasi yang serius di kalangan masyarakat Venezuela.

Ketika krisis ekonomi dan politik Venezuela terus berkembang, dengan populasi 28,5 juta jiwa, pertumbuhan ekonomi -35.0%, hiperinflasi diangka 199906.0% berdampak pada persediaan pangan, obat-obatan, persediaan medis, hingga krisis pangan dan kesehatan terjadi dinegara tersebut. Kekhawatiran lainnya selain persoalan ekonomi dan kesehatan krisis ketidakamanan termasuk menjadi persoalan yang dihadapi, praktik kepolisian yang brutal dimana sekitar 7.000 orang dalam insiden yang mereka klaim sebagai kasus "perlawanan terhadap otoritas" pada tahun 2018 dan lima bulan pertama tahun 2019, situasi dan kondisi di penjara buruk, kegagalan pemerintah dalam mengaidli pelaku [pelanggaran hak asasi manusia](#), persekusi terhadap lawan politik dan para pendukungnya yang ditangkap sehubungan dengan aktivitas demonstrasi. Lawan politiknya ini menjadi tahanan rumah atau ditahan, tindak pelecehan oleh pejabat pemerintah terhadap pembela hak asasi manusia dan media independen serta dugaan pembunuhan diluar proses hukum terjadi di negara tersebut ([hrw.org](#)).

Krisis ekonomi dan politik, diikuti dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, dan masalah kemanusiaan yang terjadi secara bersamaan menjadi penyebab lebih dari 5 juta penduduk Venezuela meninggalkan Venezuela dan menjadi salah satu krisis pengungsian terbesar di dunia. Dengan beragam alasan itulah yang menjadi latar belakang gelombang pengungsi yang datang terus meningkat masuk ke Brazil, ratusan pengungsi Venezuela melintasi perbatasan setiap hari dengan berjalan kaki, tiba dalam kondisi rentan dan membutuhkan bantuan tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan dan pekerjaan untuk menyokong kehidupan mereka.

Brazil tidak asing dengan migran dan pencari suaka hal ini terjadi sejak perang dunia II terjadi dan berkomitmen untuk melindungi setiap orang yang datang (migran) atau mencari perlindungan ke Brazil. Aturan pertama yang dikeluarkan Brazil untuk mengatur mengenai orang asing atau pendatang adalah undang-undang No. 6.815 tahun 1980, pasal-pasal di dalam undang-undang migrasi mencerminkan karakteristik Brazil selama pemerintahan berada dalam rezim militeristik yang menganggap orang asing

atau pendatang sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Kebijakan tersebut terdiri dari 141 pasal, mulai dari pasal tentang visa, naturalisasi WNA, ekstradisi, birokrasi imigrasi, deportasi dan lain-lain (planalto.gov).

Kemudian untuk menangani persoalan pengungsi Brazil turut meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, penggunaan definisi status pengungsi yang lebih komprehensif berdasarkan Deklarasi Cartagena tahun 1984, yang mana selain sepemahaman dengan definisi pengungsi secara luar menambahkan bahwa orang-orang yang meninggalkan negaranya karena pelanggaran berat terhadap HAM, agresi asing, konflik internal, atau keadaan lain yang mengancam kehidupan, keamanan, atau kebebasan mereka dapat dikatakan sebagai pengungsi yang membuat Brazil merima secara terbuka datangnya pengungsi.

Pengungsi yang berada di Brazil dan diakui berasal dari 81 negara berbeda, kebanyakan dari Suriah, Kolombia, Angola, Republik Demokratik Kongo (DRC) dan populasi pengungsi terbesar berasal dari Suriah. Pemberian status tersebut telah melalui proses penilaian CONARE. Namun tentunya kedatangan gelombang pengungsi yang sangat besar ini baru dihadapi oleh Brazil sejak awal tahun 2015 dan tercatat pada tahun 2016 Polisi Federal Brazil sekitar 183.397 orang masuk dan 111.818 keluar melalui perbatasan Pacairama dimana selama periode tersebut orang venezuela selain datang untuk membeli kebutuhan primer dan mendapatkan layanan kesehatan yang sulit didapatkan di negara mereka, memilih tinggal di Brazil sampai situasi dinegara mereka stabil. ([Rendon, Moises dan Matera, Michael A.,zil](#)).

Akibat dari situasi tersebut ditahun 2018 perbatasan Brazil dan Venezuela sempat ditutup, dan ditahun yang sama pemerintah Roraima mulai memberlakukan kebijakan bagi pengungsi atau pendatang untuk menunjukkan paspor sebelum mengakses layanan kesehatan dan keamanan dan mengarahkan polisi untuk mendeportasi migran yang melakukan kejahatan. Negara bagian Roraima mengatakan bahwa akses layanan kesehatan telah meningkat 6.500% sejak tahun 2017 saja dan tindak kriminal telah meningkat 132% sejak 2015 peningkatan ini dikaitkan dengan adanya pengungsi dan migran, kemudian pemerintah Roraima mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Brazil untuk menutup perbatasan dan dalam gugatan tersebut meminta pemerintah federal untuk mengembalikan \$50 juta Dollar yang telah dihabiskan negara bagian Roraima untuk pengungsi ([bbc.com](#)).

Pacairama salah satu kota kecil di negara bagian Roraima yang berbatasan langsung dengan Venezuela dan menjadi pintu masuk jalur darat. Pengungsi yang masuk ke Brazil melalui kota Pacairama, sebagian besar perjalanan yang mereka tempuh dengan berjalan kaki dan menumpang mobil hal ini terjadi karena umumnya ekonomi yang tidak stabil dan keinginan mereka meninggalkan Venezuela untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Letak geografis negara bagian Roraima yang relatif terisolasi dan kemampuan terbatas pemerintahnya untuk menangani masuknya pengungsi secara massal yang berdampak langsung pada sosio-ekonomi Roraima seperti layanan publik, infrastruktur penting yang tersedia, dan pada dinamika sosial pengungsi Venezuela dengan penduduk lokal.

Jumlah pengungsi yang dihitung hampir mencapai 20% dari populasi resmi Boa Vista sekarang menyebabkan meningkatnya sentimen terhadap orang-orang Venezuela yang mana kepadatan secara umum dan dampaknya pada layanan sosial menciptakan perselisihan dengan penduduk lokal, hal ini membuat mereka khususnya rentan terhadap eksploitasi, pemerasan, pemaksaan, kekerasan, perdagangan manusia, pelecehan seksual, perekrutan, dan diskriminasi dan xenofobia, ketidakmampuan pemerintah

Roraima dalam menangani persoalan tersebut menjadi masalah utama yang terkait dengan pengungsi yang datang dan dinamika sosial dengan penduduk lokal sehingga upaya pemerintah federal dibutuhkan.

Persoalan pengungsi Venezuela mendorong upaya pemerintah Brazil untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih relevan dan tanggap terhadap persoalan mengenai pengungsi tersebut dimana upaya tersebut dihasilkan pada tahun 2017-2019 dalam bentuk kebijakan sebagai hasil atau *output* dari tuntutan dan *input* yang diuraikan dengan menggunakan teori sistem politik oleh David Easton. Respon pemerintah Brazil adalah pembaruan regulasi/kebijakan mengenai pengungsi pasca kedatangan gelombang pengungsi Venezuela yang berdampak langsung terhadap cara Brazil menghadapi persoalan pendatang dan pengungsi, sejauh ini ada tiga kebijakan utama yang dihasilkan Brazil; CNIg *Normative Resolution* No. 126 tahun 2017, Undang-undang Migrasi tahun 2017, dan Dekrit Presiden No. 9.285/2018 serta 9.286/2016. Selain tiga kebijakan yang telah disebutkan, di tahun 2019 Brazil memberlakukan regulasi baru pada proses penerimaan pengungsi. Pertama pengungsi yang mendapatkan izin tinggal sementara selama 2 tahun dapat mengubah perijinan tinggal menjadi izin tinggal permanen dan akan kehilangan kesempatan untuk mengajukan permohonan suaka, kedua penerimaan pengungsi berdasarkan regulasi *prima facie basis* atau pengakuan berkelompok (*group recognition*) atas calon penerima status pengungsi.

Kesimpulan

Sebagai respon atas persoalan pengungsi Venezuela yang masuk ke Brazil dibanding menindaklanjuti adanya keluhan terhadap proses penerimaan pengungsi yang melewati proses yang panjang dan juga membutuhkan waktu yang tidak singkat, pemerintah Brazil lebih fokus pada penanganan pengungsi akan kebutuhan dasar pengungsi seperti kamp pengungsian, makanan, layanan kesehatan dan mengatur hubungan sosial antar penduduk lokal dan pengungsi yang terjadi akibat jumlah pengungsi yang terus meningkat dan kapasitas pemerintah lokal yang tidak mampu menangani persoalan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan; yaitu Undang-undang Migrasi (*Lei da Migração*) 13.445 tahun 2017 persamaan hak migran dan penduduk Brazil dimata hukum, CNIg *Normative Resolution* No. 126 tahun 2017 tentang konsesi untuk tinggal sementara bagi pendatang dari negara-negara yang berbatasan, dan Dekrit Presiden No. 9.285/2018 akibat situasi Roraima yang memburuk membuat pemerintah Brazil pada 15 Februari 2018, yang mengakui kerentanan kondisi para pendatang Venezuela akibat krisis kemanusiaan di Venezuela serta Dekret Presiden No. 9.286/2018 sebagai upaya untuk membangun Komite Darurat Federasi untuk menerima pengungsi ke dalam Brazil. Kemudian ditahun berikutnya Brazil mengeluarkan *Interministerial Ordinance* No. 09 pada Maret tahun 2019 yang mana aturan ini menjamin pendatang Venezuela memiliki hak untuk mengajukan izin tinggal tanpa tenggat waktu setelah diberikan izin tinggal sementara selama 2 tahun. Pemberian

status pengungsi Venezuela baru diberikan pada tahun 2019 dan 2020 secara bertahap terhadap pengungsi dengan ketentuan khusus setelah adanya pengakuan CONARE terhadap kondisi yang dialami oleh pengungsi Venezuela. Meskipun upaya penanganan pemerintah Brazil terhadap persoalan pengungsi Venezuela tidak spesifik membahas regulasi pemerintah Brazil yang tidak fleksibel terhadap pengakuan status bagi pengungsi Venezuela sehingga proses penerimaan masih menjadi persoalan bagi pengungsi untuk dapat kehidupan yang lebih baik. Pemerintah Brazil dan CONARE sebagai lembaga yang memberikan status bagi pengungsi juga seharusnya dapat melihat kasus pendatang dari Venezuela sebagai acuan baru dalam penilaian pengungsi meskipun pertimbangan ekonomi menjadi alasan pengungsi Venezuela meninggalkan negaranya namun mereka tidak pergi secara sukarela melainkan terpaksa akibat dari dampak masalah ekonomi, sosial, politik dan keamanan dinegaranya.

Daftar Pustaka

- ACAPS. 2020. "Venezuelan refugees." 13 Mei 2020. <https://www.acaps.org/country/brazil/crisis/venezuelan-refugees>.
- ACNUR. 2012 "The Mercosur Declaration Of Principles On International Refugee Protection". <https://www.refworld.org/pdfid/58beba094.pdf>
- Brazil. 2017. *CNIg Normative Resolution No. 126/2017*. <https://www.refworld.org/pdfid/58beba094.pdf>
- BBC. News 2018. *Venezuela crisis: Brazil briefly shuts border to migrants* <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45093581>
- Cintra de Oliveira Tavares, Natalia, dan Vinicus Pureza Cabral. 2020. "The application of the Cartagena Declaration on Refugees to Venezuelans in Brazil: An analysis of the decision-making process by the National Committee for Refugees." *Latin American Law Review*, no. 5: 121–37. <https://doi.org/10.29263/lar05.2020.06>.
- Antoine Halff, Dkk 2015. "Apocalypse Now: Venezuela, Oil And Reconstruction" [https://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/cgepapalypsenowvenezuelaoilandreconstruction7_17_1.pdf](https://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/cgepapapalypsenowvenezuelaoilandreconstruction7_17_1.pdf)
- Easton, David. 1957. "An Approach to the Analysis of Political Systems." *World Politics* 9 (3): 383–400.
- García, George Alberto. 2018. "Use of the Brazilian Military Component in the Face of Venezuela 's Migration Crisis." *Military Review*, no. November: 1–15. <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Army-Press-Online-Jubilut>, Liliana Lyra, João Carlos, dan Jarochinski Silva. 2020. "Group recognition of Venezuelans in Brazil: an adequate new model?" *Forced Migration Review*, no. 65: 42–44.
- Leal, Arlette, Adriana Palomera, dan Carmen Norambuena. 2020. "Protection and Refuge in Brazil and Chile: the Case of Palestinian Refugees - an Analysis from the Model of Economic and Cultural Adaptation." *Journal of International Migration and Integration* 21 (4): 1115–30. <https://doi.org/10.1007/s12134-019-00696-7>.
- Moulin, Carolina, dan Bruno Magalhães. 2020. "Operation shelter as humanitarian infrastructure: material and normative renderings of Venezuelan migration in Brazil." *Citizenship Studies* 24 (5): 1–21. <https://doi.org/10.1080/13621025.2020.1784643>.

UNHCR. 2018. "Venezuela Situation: Responding to the needs of people displaced from Venezuela." [http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR Venezuela Situation 2018 Supplementary Appeal.pdf](http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR_Venezuela_Situation_2018_Supplementary_Appeal.pdf).

UNHCR. n.d. "UNHCR and CONARE offices." Diakses 17 Maret 2021.
<https://help.unhcr.org/brazil/en/where-to-find-help/unhcr-offices-and-conare/>